



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SIGIT WIDODO
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 260430

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.671.979.000**

1. Tanah Seluas 3.660 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, WARISAN
Rp. 101.656.750
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/68 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.078.528.750
3. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/123 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.015.503.750
4. Tanah Seluas 130 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL
SENDIRI Rp. 210.567.500
5. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/90 m2 di KAB / KOTA
PEMALANG, WARISAN Rp. 655.177.250
6. Tanah Seluas 130 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL
SENDIRI Rp. 210.567.500
7. Tanah Seluas 125 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL
SENDIRI Rp. 202.507.500
8. Tanah Seluas 122 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL
SENDIRI Rp. 197.470.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **438.700.000**

1. MOBIL, HONDA CITY SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
98.000.000



2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.920.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.780.000
4. MOBIL, NISSAN SERENA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 196.000.000
5. MOBIL, DAIHATSU SIGRA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 263.085.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 210.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.583.764.000

III. HUTANG Rp. 26.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.557.764.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.